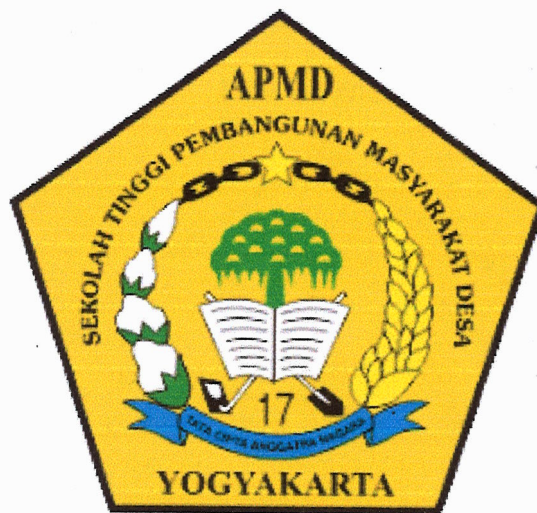


SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA**

**(Studi Kasus di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

CHRESNO ADHI WIJOYO

20520111

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2025



**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA**

**(Studi Kasus di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata
Satu (S1)

Disusun Oleh:



Chresno Adhi Wijoyo

20520111

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Februari 2025

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping I

3. Utami Sulistiana, S.P., M.P

Penguji Samping II

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chresno Adhi Wijoyo

Nim : 20520111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Objek Wisata”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutipmaupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Penulis



(Chresno Adhi Wijoyo)

20520111

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Chresno Adhi Wijoyo
NIM : 20520111
Telp : 082136470568
Email : chresnoa@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin** dan hak kepada **Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA (Studi Kasus di Kalurahan Baturetno,
Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta)"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 februari 2025
Yang membuat pernyataan



Chresno Adhi Wijoyo
20520111

HALAMAN MOTO

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

(Ir. Soekarno)

"Tetaplah berjuang, Kehidupanmu bisa berubah dalam waktu satu tahun. Dan bahkan saat hari gelap, matahari masih bersinar di suatu tempat"

(J. Cole)

"Jika kamu jatuh kamu akan segera bangkit kembali"

(A\$AP Rocky)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, berjuta-juta terima kasih saya ucapkan untuk Ayahanda tercinta Bapak Bambang Riyadi Eka Putra, S.H. dan Ibunda tercinta Ibu Siti Nurhayani, S.Pd. terima kasih karena selalu mengusahakan pendidikan anak-anakmu, selalu mendukung anak-anakmu dengan penuh kasih sayang, selalu menjadi penyemangat hidup anak-anakmu dan terima kasih selalu mendoakan setiap saat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.
2. Kurnia Eka Chandra Sari, S.E. dan Arum Laksita Sari, S.P. selaku kedua kakak tercinta, Terima kasih selalu memberikan semangat selama ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Keluarga besar “Harjo Sentono” dan “Suro Menggolo” Terima kasih untuk dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Teman dan sahabat *group* Hall APMD yang telah membantu penulis dalam bertukar informasi ketika ada informasi dari kampus.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno Dalam Pengembangan Objek Wisata”**. Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung selesainya karya tulis ini dengan baik. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. sebagai dosen penguji sampung I (satu) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. sebagai dosen penguji sampung II (dua) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kepada Seluruh tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
9. Lurah, Perangkat Kalurahan dan seluruh masyarakat Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian, dapat bekerja sama dengan baik dalam penelitian ini serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan sehingga.

Yogyakarta, 5 februari 2025

Penulis



Chresno Adhi Wijoyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
F. <i>Literatur Review</i>	6
G. Kerangka Konseptual.....	19
1. Pemerintah Kalurahan/Desa.....	19
2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan/Desa	22
3. Pengembangan Objek Wisata.....	25
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Unit Analisis.....	29
3. Lokasi Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data.....	33
BAB II.....	36

PROFIL KALURAHAN BATURETNO	36
A. Sejarah Kalurahan Baturetno	36
B. Kondisi Geografis Kalurahan Baturetno	36
C. Kondisi Demografis Kalurahan Baturetno	37
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	38
D. Kondisi Sosial.....	39
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	39
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan	40
3. Sarana Ibadah	41
4. Sarana Umum.....	41
5. Sarana Perhubungan.....	42
E. Susunan Pemerintah Kalurahan Baturetno	43
BAB III	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1. Kapasitas Regulasi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.	44
2. Kapasitas Ekstrasi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.	45
3. Kapasitas Distribusi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.	48
4. Kapasitas Responsif Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.	50
5. Kapasitas Jaringan Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.	51
BAB IV	54
KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
PEDOMAN WAWANCARA.....	60
LAMPIRAN – LAMPIRAN	63
DOKUMENTASI	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Tabel Informan	30
Tabel 2.1 Jumlah Padukuhan dan RT	37
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
Tabel 2.5 Prasarana Pendidikan	39
Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan	40
Tabel 2.7 Prasarana Ibadah	41
Tabel 2.8 Prasarana Umum	41
Tabel 2.9 Prasarana Perhubungan	42
Tabel 2.10 Data Lurah dan anggota Kalurahan Baturetno.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pembangunan Panggung Joglo Telaga desa Baturetno	48
Gambar 3. 2 Warung Pojok Kuliner Telaga desa Baturetno.....	49
Gambar 3. 3 Fasilitas MCK	51

INTISARI

Pariwisata berpotensi mendorong ekonomi lokal, dengan pemerintah desa berperan dalam mengelola sumber daya alam, budaya, dan sosial. Kalurahan Baturetno di Yogyakarta memiliki potensi wisata melalui Telaga Desa Baturetno, namun pengembangannya belum optimal, Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Objek Wisata.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara serta pengambilan dokumen. Cara yang digunakan dalam penentuan informan dengan teknik *purposive sampling* yang mana penentuan informan yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian Kapasitas Regulasi diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno belum memiliki Peraturan Kalurahan yang mengatur secara khusus tentang pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno. Ekstrasi pada pelaksanaan pengembangan adalah pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana Telaga Desa Baturetno serta masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam sejak pembangunan hingga pengembangan Telaga Desa Baturetno pada saat ini. Kapasitas Distribusi berupa pemerintah Kalurahan sangat mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat lokal, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, seperti berjualan di area yang disediakan, menjaga keamanan, serta menjaga kebersihan di sekitar objek wisata. Kapasitas Responsif pemerintah Kalurahan memiliki respons yang baik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan objek wisata, khususnya Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan Baturetno aktif mengidentifikasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan. Tidak hanya itu, pihak kalurahan juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat kerja bakti dan ronda. Kapasitas Jaringan pemerintah Kalurahan secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan perguruan tinggi, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola objek wisata. Kerja sama ini mencakup berbagai pelatihan yang beragam, seperti pelatihan pengelolaan desa wisata, kependamuan, pengelolaan sampah, homestay, pembuatan souvenir berbasis alam, pemberdayaan UMKM, serta penyuluhan tentang pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kata Kunci: Kapasitas, Kalurahan, Pengembangan, Objek Wisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, terutama di desa-desa. Pemerintah desa memegang peran sentral dalam mengelola sumber daya alam, budaya, dan sosial yang ada di wilayahnya. Dalam konteks ini, pengembangan wisata bukan sekadar menciptakan atraksi bagi wisatawan, tetapi juga merupakan strategi penting untuk memperkuat modal sosial dan modal ekonomi masyarakat desa. Melalui tindakan efektif pemerintah desa, potensi wisata desa dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, langkah awal guna menciptakan kemandirian desa sehingga desa mampu dipercaya dalam membangun dan memajukan Indonesia menjadi lebih baik dari saat ini. Oleh karena itu, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang di mana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, sehingga hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Keanekaragaman wisata dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam terutama keanekaragaman wisata yang begitu indah dengan ciri khas yang dimiliki di setiap daerah. Kekayaan alam serta keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi sebuah daya tarik wisatawan, baik wisata lokal maupun mancanegara, dengan demikian Indonesia dapat mengembangkan kekayaan akan potensi yang

dimiliki tersebut menjadi pariwisata. Dalam dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan. Serta (Pasal 12: 1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata). Dalam era globalisasi sekarang ini bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Sektor pariwisata direncanakan tidak hanya sebagai salah satu sumber pendapatan devisa, tetapi juga sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi. Menurut Anindita (2015) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan sektor ini dengan merancang rencana dan kebijakan yang mendukung kemajuan, termasuk strategi dalam memanfaatkan potensi wisata lokal sebagai daya tarik utama bagi pengunjung.

Kalurahan Baturetno terletak di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Baturetno memiliki letak yang strategis karena dilewati oleh Jalan Jogja-Wonosari yang merupakan jalan nasional. Hal ini dapat menguntungkan karena aksesibilitas untuk mempermudah wisatawan berkunjung ke objek wisata yang ada di Kalurahan Baturetno. Telaga Desa Baturetno menyimpan pesona alam yang begitu memikat, membuatnya menjadi destinasi wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Dengan pemandangan alam yang luar biasa, telaga ini menawarkan suasana yang begitu damai dan menenangkan. Air telaga yang jernih dan terdapat ikan-ikan didalamnya menjadi daya tarik utama. Pepohonan yang tumbuh rimbun di sekitar telaga juga menambah kesejukan udara, menciptakan atmosfer yang sangat alami dan menenangkan bagi siapa saja yang datang.

Meskipun memiliki objek wisata yang ada, Kalurahan Baturetno dalam pengembangannya objek wisata belum optimal. Pemerintah Kalurahan Baturetno berkeinginan untuk menjadikan Telaga Desa Baturetno sebagai sebuah destinasi wisata yang dapat menarik banyak pengunjung. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan objek wisata.

Berangkat dari permasalahan diatas maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada sebuah kajian *Governability* yang di mana merupakan salah satu landasan disiplin ilmu pemerintahan. Dalam hal ini juga *Governability* merujuk

pada sebuah otoritas dan kapasitas pemerintah yang dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memerintah sesuai dengan regulasi dan pelayanan. (Eko Sutoro, 2013) Untuk mengukur kapasitas tersebut, dapat diukur dari beberapa dimensi yaitu, Kapasitas regulatif, kemampuan pemerintah desa merancang dan menetapkan regulasi; Kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan mengumpulkan, menggerakkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah desa dan masyarakatnya; Kapasitas distributif, adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; Kapasitas responsif, yaitu kepekaan atau daya tanggap pemerintah desa untuk menyerap aspirasi warga desa; dan Kapasitas jaringan dan Kerjasama, kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Objek Wisata?”

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi yang berjudul Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno Dalam Pengembangan Objek Wisata di Kalurahan

Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Kapasitas regulasi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata.
2. Kapasitas ekstrasi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata.
3. Kapasitas distribusi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata.
4. Kapasitas responsif pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata.
5. Kapasitas jaringan pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kapasitas pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian - penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji Kapasitas Pemerintah Lokal dalam pengembangan sektor pariwisata khususnya di

Kalurahan Baturetno dan diharapkan mampu memberikan masukan serta pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan wawasan berpikir

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam merumuskan strategi pengembangan objek wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan objek wisata yang dapat diterapkan oleh pemerintah kalurahan
- c. Membantu pemerintah Kalurahan Baturetno dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan objek wisata.

F. Literatur Review

Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal Academia Praja Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 yang ditulis oleh Agustina Setiawan, Widuri Wulandari dan Siti Munawaroh yang berjudul “Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Diuraikan bahwa pengembangan potensi wisata di Desa Cimanggu belum berjalan optimal meskipun memiliki sumber daya alam yang menarik seperti mata air panas dan Curug Cimanggu. Kendala utama yang dihadapi adalah

kurangnya infrastruktur pendukung, promosi yang minim, serta kepemilikan asset wisata oleh masyarakat adat yang menyulitkan koordinasi dengan pemerintah desa. Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, serta pelatihan aparatur desa dalam teknologi informasi untuk mempromosikan potensi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, dengan tujuan mengidentifikasi fenomena yang ada secara rinci dan mendalam.

2. Jurnal Moderat Volume 6 Nomor 4 Tahun 2020 yang ditulis oleh Ari Kusumah Wardani dan Slamet Riyadi yang berjudul “Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis”. Desa memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa diharapkan mampu menggali potensi lokal, termasuk pariwisata budaya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, di Kabupaten Ciamis, inovasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam masih minim. Pembangunan pariwisata budaya yang berkelanjutan perlu didukung oleh kebijakan desa yang melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, meski saat ini Pemerintah Desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan administrasi. Pariwisata budaya, dengan daya tarik seni, sejarah, dan tradisi lokal, menjadi salah satu potensi

ekonomi yang signifikan. Wisata budaya dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Peningkatan pariwisata harus melibatkan sinergi antara Pemerintah Desa dan mitra eksternal serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, konsep smart tourism yang mengoptimalkan teknologi dan data dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa hanya berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata budaya. Di Desa Karangpaningal, potensi wisata budaya dikelola oleh komunitas lokal dengan dukungan Pemerintah Desa yang memfasilitasi partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan desa wisata memerlukan kompetensi SDM yang memadai, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas yang baik untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Jurnal Pengembangan Kota Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti yang berjudul “Kapabilitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). Pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam bentuk desa wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi urbanisasi. Sejak program Visit Indonesia diluncurkan pada 2007, jumlah desa wisata meningkat tajam. Pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana. Kelembagaan berperan penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi

manfaat, serta dalam mengembangkan partisipasi masyarakat melalui organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kabupaten Banyumas memiliki enam desa wisata, namun hanya Desa Wisata Ketenger dan Dawuhan yang dianggap layak dikunjungi karena kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Desa Wisata Ketenger, terletak di Kecamatan Baturaden, memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Desa ini dikelola oleh POKDARWIS "Ketenger Adventure," yang berdiri sejak 2004. Organisasi ini memiliki kepemimpinan demokratis, tetapi terdapat kelemahan dalam pengambilan keputusan dan ketergantungan pada pemimpin. POKDARWIS "Ketenger Adventure" telah menjalin kemitraan eksternal yang baik, menerima dana bantuan dari pemerintah untuk berbagai proyek pariwisata. Namun, masalah koordinasi internal masih perlu diperbaiki agar organisasi dapat berfungsi lebih optimal. Penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ketenger memiliki kapasitas organisasi dan individu yang baik dalam mengelola wisata. Kepemimpinan dan koordinasi, kemitraan eksternal, pengembangan atraksi wisata, dan promosi desa wisata menunjukkan hasil yang positif. Namun, individu masih kurang dalam memahami dan mengaplikasikan konsep desa wisata terpadu. Pemerintah dan pengelola desa wisata disarankan untuk meningkatkan integrasi potensi wisata alam, budaya, dan desa melalui kerjasama yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antar individu, kelompok informal, dan organisasi formal serta kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata.

4. Jurnal Wacana Kinerja Volume 22 Nomor 2 Tahun 2019 yang ditulis Neri Fajarwati yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”. Era reformasi telah mengubah paradigma sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan kebijakan lokal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri, terutama dalam mengelola kekayaan alam dan ekonomi lokal. Perubahan ini juga berdampak pada tingkat kecamatan dan desa, di mana tugas yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat kini menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sering terhambat oleh kapasitas aparatur desa yang masih rendah, termasuk tingkat pendidikan yang belum memadai. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan kapasitas aparatur desa menjadi fokus penting. Pengembangan kapasitas bertujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Desa Cibodas, misalnya, telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang administrasi, pengelolaan anggaran, dan tata naskah dinas. Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas aparatur Desa Cibodas antara lain komitmen bersama, kepemimpinan yang kuat, reformasi peraturan dan kelembagaan, serta pengakuan terhadap kekuatan dan kelemahan aparatur

desa. Program pelatihan yang dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Dengan adanya upaya pengembangan kapasitas ini, diharapkan dapat terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa.

5. Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021 yang ditulis Erni Irawati yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)”. Desa merupakan entitas penting dalam masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan adat-istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut H.A.W. Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli dan otonomi yang diakui dalam pemerintahan nasional. Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang berasal dari hak asal-usulnya, termasuk urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Otonomi desa diakui dan dihormati oleh pemerintah, yang memberikan desa hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan bagi desa untuk menjadi komunitas mandiri yang berhak menentukan kepentingan masyarakatnya sendiri, dengan fokus pada keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis regulasi pemerintahan desa dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Desa masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, keterbatasan staf, rendahnya kualitas pendampingan,

dan keterisolasian. Namun, dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa diharapkan mampu menjadi komunitas yang mandiri dengan kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Cilacap, dengan 269 desa, menunjukkan tantangan dalam peningkatan kapasitas desa, terutama dalam hal kualitas dan kompetensi SDM serta perangkat pendukung kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas desa memerlukan perhatian khusus pada tiga aktor utama: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Kompetensi aparat pemerintah desa harus ditingkatkan untuk mampu melaksanakan tugas baru yang lebih kompleks. Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa dan bantuan pemerintah daerah, tetapi juga pada kreativitas masyarakat dalam memajukan desa. Untuk mencapai desa yang maju dan mandiri, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kebijakan yang tepat sangat diperlukan. Penggunaan dana desa harus diawasi dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

6. Jurnal Indonesian Journal of Public Policy Review Volume 18 Tahun 2022 yang ditulis Putri Aulia Anggita dan Sukmana Hendra yang berjudul “Analisis Program Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata”. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Dengan keberagaman flora, fauna, dan warisan budaya yang melimpah, pariwisata menjadi salah satu sektor penting yang berperan dalam pertumbuhan

ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun begitu, pengembangan pariwisata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti peraturan yang tidak sinkron, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya investasi serta perhatian terhadap aspek lingkungan. Di Kabupaten Mojokerto, pariwisata menjadi salah satu fokus pengembangan, dengan adanya berbagai destinasi wisata yang menarik seperti wisata alam, buatan, dan sejarah. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah program Rumah Majapahit yang bertujuan melestarikan budaya dan meningkatkan promosi pariwisata. Desa Watesnegoro, yang berada di Kecamatan Ngoro, juga memiliki potensi wisata sejarah melalui wisata Sumber Gadung, yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis program pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata Sumber Gadung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan komponen pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi menjadi faktor penting dalam mengembangkan wisata Sumber Gadung. Meskipun promosi telah dilakukan melalui media massa, hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah desa berencana menambah promosi melalui media sosial dan web, yang dinilai lebih efektif dalam menjangkau kalangan muda. Pemanfaatan platform seperti Instagram dan Facebook diharapkan dapat meningkatkan eksposur wisata ini. Selain promosi, sosialisasi juga menjadi

program penting untuk memperkenalkan wisata Sumber Gadung kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar Kecamatan Ngoro. Koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto juga direncanakan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan wisata ini, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menjaga warisan budaya yang ada.

7. Jurnal Wedana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020 yang ditulis Soeraya St, Barisan dan Jabbar Abdul yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Desa Wisata Alam Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidereng Rappang”. Sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi besar yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan keindahan alam dan keberagaman budaya sebagai daya tarik utama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menekankan pentingnya pengembangan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan melestarikan lingkungan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam strategi pengembangan pariwisata, yang mencakup kebijakan, tujuan, dan penggunaan sarana-prasarana. Desa Leppangeng di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah contoh desa yang mulai mengembangkan potensi pariwisatanya dengan objek wisata seperti spot foto, arum jeram, dan air terjun. Namun, desa ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk biaya tinggi, akses yang buruk, dan minimnya fasilitas pendukung, yang menghambat jumlah pengunjung. Penelitian ini

menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi strategi pengembangan pariwisata Desa Leppangeng. Strategi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas dan fasilitas wisata, pemanfaatan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Fokus utama adalah pada peningkatan infrastruktur, promosi, dan pelatihan bagi masyarakat dan pengelola wisata. Saran untuk pemerintah desa adalah menerapkan strategi protektif untuk menghindari ancaman eksternal dan internal, serta meningkatkan fasilitas umum dan pelatihan manajemen pariwisata. Pendekatan ini akan membantu Desa Leppangeng dalam mengoptimalkan potensi wisata dan meningkatkan daya tarik sebagai destinasi wisata alam.

8. Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023 yang ditulis Eriyadi Kerisman, Firmando Boni Harisan, Nadeak J R Tio, Simbolon T Elvri dan Lase Sudirman yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Wisata Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba”. Desa Tarabunga di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, telah ditetapkan sebagai Desa Wisata pada 5 Juni 2018 melalui SK Bupati Toba. Desa ini memiliki potensi wisata alam yang besar, dengan panorama indah Danau Toba, persawahan yang tertata rapi, serta bukit-bukit yang hijau. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati berbagai objek wisata, seperti panorama Puncak Tarabunga dan wisata rumah pohon yang menawarkan pemandangan Danau Toba. Meskipun Pantai Tarabunga memiliki potensi keindahan, sayangnya, objek wisata ini belum terkelola dengan baik. Strategi pengembangan pariwisata di Desa Wisata Tarabunga sangat

penting mengingat status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan bagian dari UNESCO Global Geopark sejak 2020. Namun, saat ini pengembangan destinasi wisata di desa ini masih terbatas oleh aksesibilitas dan sarana prasarana yang belum memadai. Misalnya, akses jalan yang sulit dan fasilitas home stay yang belum layak untuk pengunjung. Selain itu, pengenalan budaya lokal sebagai daya tarik wisata belum optimal. Pemerintah Desa Tarabunga telah merencanakan strategi pengembangan yang komprehensif untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada. Fokus pengembangan tidak hanya pada satu objek wisata, tetapi mencakup seluruh kawasan Desa Wisata Tarabunga, termasuk Puncak Tarabunga, Pantai Tarabunga, dan situs sejarah Batu Sada. Strategi ini mencakup perencanaan infrastruktur, peningkatan promosi, dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang dimiliki pemerintah desa adalah Masterplan pembangunan objek wisata Puncak Tarabunga. Masterplan ini memberikan gambaran lengkap tentang jaringan sarana dan prasarana, letak fasilitas, serta estimasi dana yang diperlukan untuk pengembangan objek wisata tersebut. Dengan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, diharapkan Desa Wisata Tarabunga dapat berkembang menjadi tujuan wisata yang menarik dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pengembangan Desa Wisata Tarabunga memerlukan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya, serta memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas pendukung,

Desa Tarabunga dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan kompetitif di kawasan Danau Toba.

9. Jurnal Niara Volume 15 Nomor 2 Tahun 2022 yang ditulis Amri Khairul, Wahidar Ismi Tutut, Fuadi Ahmad, Habibie Kusuma Dedi dan Meiwanda Geovani yang berjudul “Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis”. Tulisan ini menggambarkan pentingnya sektor pariwisata dalam pembangunan nasional, yang melibatkan pelaku, kebijakan, sosial-budaya, dan proses penyelenggaraan sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah wilayah dengan fungsi utama dalam pengembangan pariwisata nasional yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata negara. Salah satu contoh KSPN adalah Pulau Rupert di Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Rupert Utara, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Desa Teluk Rhu, yang terletak di Rupert Utara, memiliki pantai berpasir putih sepanjang 17 km, yang merupakan potensi wisata utama di kawasan ini. Selain wisata pantai, Teluk Rhu juga memiliki potensi lain seperti hutan mangrove, zapin api, joget lambak, dan berbagai festival budaya. Desa ini memiliki Bumdesa Amanah yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata dengan visi untuk menjadikan Teluk Rhu sebagai destinasi wisata bahari dan budaya yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan pariwisata di Teluk Rhu membutuhkan perhatian pada aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana dan prasarana

yang mendukung. Kapasitas kelembagaan, baik dari sisi kepemimpinan, koordinasi, kemitraan eksternal, dan pengembangan potensi wisata, sangat penting untuk keberhasilan pengembangan kawasan ini. Melalui partisipasi masyarakat, kemitraan dengan pihak swasta, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata di Teluk Rhu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah.

10. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 yang ditulis Wardana Data, Zainal dan Ginting Harimas Arwanto yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Kepariwisata adalah sektor penting dalam pembangunan nasional yang mendukung pendapatan dan pemerataan peluang usaha. Wisata alam Teluk Jering, atau "Pulau Cinta," di Riau, dikenal karena keindahan hamparan pasir putih di tepi Sungai Kampar, namun pengembangannya terbatas oleh kurangnya perhatian pemerintah, akses transportasi yang sulit, dan minimnya fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis strategi pengembangan Teluk Jering, dengan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Daya tarik utama destinasi ini adalah alamnya, namun fasilitas seperti sarana bermain anak, tempat ibadah, dan ruang ganti masih sangat terbatas. Meskipun pemerintah setempat telah memperbaiki jalan, fasilitas seperti penginapan dan restoran masih perlu dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Akses ke Teluk Jering sudah lebih baik melalui jalan darat dan sungai, tetapi transportasi umum masih belum ada. Selain itu, amenities pendukung pariwisata, seperti

hotel, restoran, dan toko souvenir, sangat dibutuhkan. Kelembagaan yang mendukung pengembangan pariwisata juga perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah dalam kebijakan, penyediaan fasilitas, dan penyelenggaraan acara budaya. Kesimpulannya, Teluk Jering memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, namun memerlukan kebijakan yang jelas, pembangunan infrastruktur, serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan fasilitas dan kegiatan wisata. Pemerintah desa juga diharapkan menggunakan anggaran desa untuk pembangunan sarana wisata dan pembinaan masyarakat.

Dari beberapa literatur artikel jurnal penelitian di atas, hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang penulis ambil adalah sama-sama membahas dan berkaitan dengan kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan objek wisata serta penelitian studi kasus. Namun, jika dihubungkan dengan penelitian ini terdapat beberapa faktor yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini terfokus pada kapasitas pemerintah kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata berdasarkan perspektif *governability*. Adapun judul yang dibahas dalam penelitian ini adalah "Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam Pengembangan Objek Wisata".

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Kalurahan/Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup

memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3)

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakika negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas wilayah dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut dengan Pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekedar pemerintahan desa, bukan hanya sekedar Pemerintah desa serta bukan hanya sekedar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

Perangkat desa telah ditentukan mengenai jumlah unsur sekretariat pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis, yang menggambarkan mengenai unit-unit kerja dalam organisasi pemerintah desa. Tidak ada pendelegasian secara eksplisit untuk pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pemerintah desa kepada peraturan menteri. Kewenangan Pemerintah Desa adalah hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan

yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang mencakup pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Kewenangan pemerintah desa dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat. Dalam hal ini pula Desa atau sekarang yang berganti nama menjadi Kalurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan bahwa Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

2. Kapasitas Pemerintah Kalurahan/Desa

Dalam membangun desa, Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kapasitas. Seperti diketahui menurut Soeprapto (2010:10); “kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu,

organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Dengan adanya kapasitas pada diri seseorang dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, pemerintah desa harus memiliki pemahaman, keterampilan dan kemampuan yaitu memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik. Jika berbicara konsep kapasitas tidak lepas dari konsep *Governability*. *Governabilitas* dalam konteks pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kapasitas pemerintah desa, yang mencakup Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan efektif. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. (Marceta, 2022).

Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan. Sedangkan Millen (2012) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Menurut Rozaki (2005) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan yang mengandung arti keahlian, profesionalitas, efektivitas, efisiensi dan kinerja. Rozaki juga menyampaikan kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

- a. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa berserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- b. Kapasitas ekstrasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat.
- c. Kapasitas distribusi adalah kemampuan pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- d. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa.
- e. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Dari beberapa pengertian di atas kapasitas sangat berkaitan dengan konsep *governability* yang disampaikan oleh Rozaki dalam bukunya "Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan", menyebutkan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan.

Sutoro Eko juga menyampaikan bahwa *Governability* mengandung 5 (lima) dimensi, yaitu kapasitas, otoritas, aktivitas, efektivitas memerintah dan legitimasi

yang dilakukan Pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, maka governability yang diambil adalah kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan objek wisata, kapasitas pemerintah kalurahan tersebut sangat di perlukan dalam pengembangan objek wisata di Kalurahan Baturetno.

3. Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan adalah pekerjaan untuk bekerja pada kapasitas khusus, hipotetis, terapan, dan moral perwakilan yang ditunjukkan oleh kebutuhan pekerja atau posisi melalui instruksi dan persiapan. Pengembangan pula merupakan pekerjaan untuk bekerja pada kapasitas khusus, hipotetis, terapan, dan moral perwakilan yang ditunjukkan oleh kebutuhan pekerja atau posisi melalui instruksi dan persiapan. Menurut Hayati dalam Reni Andriani (2019), pengembangan adalah pekerjaan yang dilakukan secara resmi dan berkesinambungan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perluasan kapasitas dalam membina suatu usaha. Oleh karena itu, peningkatan dalam arti yang sangat sederhana adalah cara membuat. Menurut Wiryokusumo dalam Reni Andriani (2019), pengembangan adalah suatu upaya edukatif baik formal maupun nonformal yang sengaja, tersusun, terkoordinasi dan penuh perhatian untuk menghadirkan, mengembangkan, membimbing, dan membina premis karakter yang disesuaikan, tanpa cela. dan sebagai satu dengan informasi dan kemampuan. Kemampuan yang ditunjukkan dengan karunia, keinginan sesuai kapasitas, menuju pencapaian keluhuran, kualitas dan kapasitas manusia yang ideal dan orang bebas.

Dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata tersebut untuk saat ini masyarakat belum bisa mengembangkan pariwisatanya secara mandiri, masih

memerlukan campur tangan banyak pihak baik dari lembaga negara maupun lembaga swasta yang berkecimpung dalam dunia pariwisata, dalam mengembangkan pariwisata terkadang masyarakat bingung soal apa yang harus mereka lakukan dan harus memulai dari mana, tanpa disadari bahwa sudah ada aturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dibuat bukan hanya untuk mengatur tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam pariwisata, akan tetapi undang-undang tersebut juga menjadi buku panduan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa aspek kepariwisataan termasuk hak serta kewajiban wisata, pelaku usaha, pemerintah serta pembangunan destinasi wisata. Tujuannya adalah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan juga citra bangsa melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan di mana Penyelenggaraan kepariwisataan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat setempat, Pengembangan pariwisata harus melibatkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, Diperlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sehingga dari itu pentingnya pengembangan objek wisata yang sudah ada agar berkembang dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, dengan pengembangan objek wisata ini pula dapat mempertahankan keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, dan budaya pada wilayah tersebut. Menurut Yeoti dalam Maryetti (2016: 31) pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

a) Wisatawan (*Tourist*)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

b) Transportasi

Harus dilakukan penelitian berbagai fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju

c) Atraksi/objek Wisata

Atraksi dan objek wisata yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat seperti: 1) apa yang dilihat (*something to see*), 2) apa yang dapat dilakukan (*something to do*), 3) apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

d) Fasilitas pelayanan

Fasilitas apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata (DTW) tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, *restaurant*, pelayanan umum seperti bank/*money changers*, kantor pos, telepon/*teleks*, yang ada di DTW tersebut.

e) Informasi dan Promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya

Menurut Nuryanti dalam Fitria Badarab (2017) pada dasarnya pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *mathcing and adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply and*

demand kepariwisataan yang tersedia sehingga dapat tercapai misi yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari karakteristik wisatawan, fasilitas transportasi, atraksi, hingga pelayanan di destinasi wisata. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dan menjaga kearifan budaya serta keanekaragaman alam agar pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi pedoman penting dalam pengaturan hak dan kewajiban semua pihak terkait, serta dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan demikian, pengembangan objek wisata harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Menurut Sugiyono (2017) Penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Moleong, 2002). Untuk mengetahui peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan objek wisata di Kalurahan Baturetno,

maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Nawawi (2001), metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak.

2. Unit Analisis

a. Objek

Objek dalam penelitian ini yaitu Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek

Dalam penelitian kualitatif sebuah subjek penelitian sangat berperan penting dikarenakan dalam penelitian ini memegang data mengenai variabel yang akan penelitian amati. Adapun yang merupakan dari subjek penelitian adalah informan ataupun narasumber yang di mana dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi atau data didalam sebuah penelitian. Informan ataupun narasumber di dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan juga untuk menentukan sejauh mana kapasitas pemerintah kalurahan Baturetno dalam melakukan pengembangan objek wisata

Penentuan informan dalam sebuah penelitian ini diambil dengan teknik purposive. Konsep tentang purposive menurut (Crewswell. 2015:217) digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Hal ini yang berarti bahwa sang peneliti memilih beberapa individu dan tempat untuk diteliti karena mereka secara spesifik memberi sebuah pemahaman akan suatu problem riset fenomena di dalam studi tersebut. Adapun untuk memilih

informan dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat dikembangkan untuk perolehan data. Berikut yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Data Informan

No	Nama	Pekerjaan/ Jabatan	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir
1	Sarjaka	Kepala Kalurahan	63	SLTA
2	M. Lu'ai Arminanto, ST.	Carik	33	S1
3	Sopi Aribowo, A.Md.	Ulu-Ulu	40	D3
4	Imam Widodo	Wakil Ketua Pokdarwis	56	SLTA
5	Dr. Jumarudin, S.Pd., M.Pd.	Ketua Bamuskal Baturetno	57	S3
6	Nining Susilowati, S.E.	Pedagang /Masyarakat	42	S1
7	Rafli Ramadhani	Wiraswasta/ Masyarakat	26	SMK
8	Asfriadhi Rizky	Mahasiswa/Masyarakat	24	SMA

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Telaga Desa Baturetno yang terletak di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen yang terkait dengan Kalurahan Baturetno. Sementara itu, data primer diperoleh

melalui pengamatan langsung serta hasil wawancara dengan informan. Dalam menentukan informan, penelitian ini mengadopsi teknik purposive sampling. Artinya, pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan khusus, seperti kemampuan narasumber dalam memberikan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode. Pertama, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terkait Kalurahan Baturetno. Kedua, observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung melalui pengamatan terhadap situasi atau kejadian di lapangan. Ketiga, wawancara dengan narasumber juga dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dan kontekstual. Terakhir, Dokumentasi gambar foto yang dijadikan kumpulan bahan atau bukti yang mendukung proses penelitian. Kombinasi metode-metode ini diharapkan dapat memastikan keberagaman dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Sugiyono (2018:229) menjelaskan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan objek wisata, penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di Telaga Desa Baturetno sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Menurut Saroso (2017:47) wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari informan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan kepala kalurahan Baturetno, carik kalurahan Baturetno, ulu-ulu kalurahan Baturetno, Ketua Bamuskal Baturetno, Pokdarwis Baturetno, Pedagang di Telaga Baturetno dan masyarakat Baturetno. Penulis dalam proses wawancara menanyakan pertanyaan dalam pedoman wawancara, kemudian *Handphone* sebagai *tape recorder* alat untuk merekam proses wawancara yang dilukan dan buku untuk mencatat hal penting dalam wawancara. Sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam memperoleh sumber data utama dari penelitian yang dilakukan, yakni terkait dengan kapasitas pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dan data primer, dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen Profil Desa Baturetno serta foto-foto

kondisi dan fasilitas di Telaga Desa Baturetno. Sehingga nantinya, teknik dokumentasi ini dapat mendukung peneliti dalam mengecek ulang data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk mengolah dan memproses data dengan tujuan menghasilkan informasi yang valid dan dapat dimengerti oleh orang lain. Sugiyono (2010:335) menjelaskan bahwa teknik analisis data melibatkan langkah-langkah seperti mencari data, mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara terstruktur. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, penguraian menjadi unit-unit yang lebih kecil, penyintesis, pemilihan informasi yang relevan untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lainnya. Langkah – Langkah dalam melakukan analisis data adalah:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data mengenai penelitian tentang kapasitas pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata, penulis melakukan pemilihan terhadap hasil penelitian yang relevan dan berguna untuk pembahasan penelitian. Hal ini dilakukan karena dalam proses wawancara karena ada informan yang menyampaikan hal diluar tema yang diteliti. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang telah dikelompokkan dan disederhanakan akan memudahkan peneliti untuk

mengumpulkan data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data jika dibutuhkan

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data tentang kapasitas pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata data yang telah dikelompokkan dan disaring akan disusun oleh penulis dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca untuk memahami temuan-temuan utama dari penelitian, serta menggambarkan secara jelas konteks dan hasil penelitian yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan antara fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam Penarikan Kesimpulan tentang penelitian yang berjudul kapasitas pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata, tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Penggunaan data tersebut akan mempermudah peneliti dalam menganalisis fenomena yang diteliti, karena data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih

jelas dan konkret mengenai topik yang dibahas. Dengan demikian, data dari dokumentasi dan wawancara tidak hanya berfungsi sebagai bukti empiris, tetapi juga sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BATURETNO

A. Sejarah Kalurahan Baturetno

Kalurahan Baturetno terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Baturetno ini berdiri pada tahun 1946, yang di mana kalurahan ini merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Kalurahan Lama (Kalurahan sebelum kemerdekaan), yakni Kalurahan Mantup, Kalurahan Wiyoro, dan juga Kalurahan Ngipik. Adanya gabungan dari 3 (tiga) Kalurahan lama yang disebutkan tersebut menjadikan kalurahan Baturetno ini berada di bawah Wilayah Kapanewon Kota Gede Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kalurahan Baturetno, yakni di wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; untuk di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul; Dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

B. Kondisi Geografis Kalurahan Baturetno

Kalurahan Baturetno secara administratif berada di Kapanewon Banguntapan di wilayah Bantul. Adapun luas dari Kalurahan Baturetno ini sebesar 371.1730 Ha. Batas wilayah Kalurahan Baturetno yakni:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Lanud Adisucipto
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Potorono, Banguntapan Bantul.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Banguntapan, Bantul.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman.

Untuk jarak dari pusat pemerintahan kalurahan yakni di mana dari Pusat Pemerintahan Kapanewon berjarak 1 Km, sedangkan jarak dari Kabupaten Bantul berjarak 12 Km, untuk jarak dari Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berjarak 8 Km. Adapun padukuhan yang berada di Kalurahan Baturetno terdiri 8 (delapan) padukuhan, yaitu:

Tabel 2.1

Jumlah Padukuhan Dan RT di Kalurahan Baturetno

No	Nama Padukuhan	Rukun Tetangga (RT)
1	Padukuhan Pelem	14
2	Padukuhan Mantup	17
3	Padukuhan Kalangan	20
4	Padukuhan Wiyoro	13
5	Padukuhan Manggisari	8
6	Padukuhan Ngipik	6
7	Padukuhan Plakaran	6
8	Padukuhan Gilang	10

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Kalurahan Baturetno memiliki luas tanah yang didominasi tanah berjenis lempung berpasir serta lempung berdebu yang di mana memiliki kemiringan 2,62% dan memiliki kondisi tanah yang bergelombang serta tanah datar yang memiliki ketinggian tempat berkisar 100-110 meter di atas permukaan laut.

C. Kondisi Demografis Kalurahan Baturetno

Dari data monografi kalurahan tahun 2023, jumlah penduduk Kalurahan Baturetno sebesar 17.514 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki 8.751 jiwa. Sedangkan jumlah perempuan 8.763 jiwa. Berikut merupakan rincian table berdasarkan jumlah penduduk:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah tabel dari jumlah penduduk di Kalurahan Batyretno berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kalurahan Baturetno Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	8.751	49.97
2	Perempuan	8.763	50.53
Jumlah		17.514	100.00

Sumber: Kalurahan Baturetno 2024

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	0-12 Bulan	45	0.26
2	1-9 Tahun	2.019	11.52
3	10-19 Tahun	2.757	15.75
4	20-29 Tahun	2.611	14.92
5	30-39 Tahun	2.498	14.26
6	40-49 Tahun	2.738	15.64
7	50-59 Tahun	2.347	13.41
8	60-69 Tahun	1.666	9.51
9	70-79 Tahun	599	3.42
10	Lebih dari 79 Tahun	206	1.18
Jumlah		17.514	100.00

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dengan merujuk pada kebiasaan masyarakat hingga perbedaan lingkungan, budaya, pendidikan dan kebutuhan lain-lain, Setiap daerah mempunyai perbedaan kegiatan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di Kalurahan dapat ditemui beberapa mata pencaharian masyarakat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4**Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Petani	47	0.27
2	Peternak	1	0.01
3	Pegawai Negeri Sipil	582	3.32
4	TNI	62	0.35
5	POLRI	68	0.39
6	Karyawan perusahaan Swasta	2.436	13.91
7	Pelajar/Mahasiswa	3.506	20.02
8	Wiraswasta	2.429	13.87
9	Buruh Tani/Perkebunan	204	1.16
10	Dan Lain-Lain	8.179	46.70
Jumlah		17.514	100.00

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

D. Kondisi Sosial**1. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Dalam mendukung pendidikan Masyarakat, Kalurahan Baturetno memiliki Prasarana Pendidikan seperti pada tabel dibawah:

Tabel 2.5**Prasarana Pendidikan Kalurahan Baturetno**

No	Nama	Jumlah (Unit/Buah)
1	Paud / TK	11
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	24
3	Sekolah Dasar / MI	7
4	Sekolah Menengah Pertama/MTs	2
5	Sekolah Menengah Atas/SMK/MA	2
6	Institusi/SekolahTinggi/Universitas	-
Jumlah		46

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Baturetno sangat cukup memadai, mulai dari Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA),

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar /MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/SMK/MA, serta Institusi/SekolahTinggi/Universitas.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kalurahan Baturetno memiliki fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakatnya. Berikut Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimiliki oleh Kalurahan Baturetno:

Tabel 2.6

Prasarana Kesehatan Kalurahan Baturetno

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Klinik Dokter	2
3	Posyandu Balita	14
4	Posyandu Lansia	9
5	Bidan Kalurahan	1
6	Praktik Bidan	8
Jumlah		35

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Fasilitas Kesehatan di Kalurahan Baturtno sudah smemadahi di mana terdapat Puskesmas, Klinik Dokter, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Bidan Kalurahan dan Praktik Bidan.

3. Sarana Ibadah

Kalurahan Baturetno memiliki prasarana untuk menunjang peribadatan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Prasarana Ibadah Kalurahan Baturetno

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	30
2	Mushola	19
3	Gereja	1
Jumlah		50

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Fasilitas Prasarana Ibadah di Kalurahan Baturetno sudah memadai untuk menunjang Peribadatan, di mana terdapat masjid yang berjumlah 30, Mushola berjumlah 19 dan satu gereja.

4. Sarana Umum

Kalurahan Baturetno memiliki prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 2.8

Prasarana Umum Kalurahan Baturetno

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah
1	Olahraga	30
2	Kesenian/Budaya	5
3	Balai Pertemuan	9
4	Pasar	2
Jumlah		46

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Sarana Umum di Kalurahan Baturetno sudah lengkap di mana terdapat Sarana Olahraga yang berjumlah 30, Sarana Kesenian atau Budaya yang berjumlah 5, Balai Pertemuan yang berjumlah 9 dan 2 Pasar Desa.

5. Sarana Perhubungan

Kalurahan Baturetno memiliki fasilitas Perhubungan untuk menunjang mobilitas bagi masyarakatnya. Berikut Sarana Perhubungan yang dimiliki oleh Kalurahan Baturetno:

Tabel 2.9

Prasarana Umum Kalurahan Baturetno

No	Jenis Prasarana Perhubungan	Jumlah (Km)
1	Jalan Padukuhan	13,238
2	Jalan Kalurahan	6,494
3	Jalan Kabupaten	1,702

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2024

Kalurahan Baturetno sudah memiliki kondisi Sarana Perhubungan yang memadai untuk menunjang mobilitas bagi masyarakatnya di mana terdapat Jalan Padukuhan yang panjangnya 13,238 Kilometer, Jalan Kalurahan yang panjangnya 6,494 Kilometer dan Jalan Kabupaten yang panjangnya 1,702km

E. Susunan Pemerintah Kalurahan Baturetno

Tabel 2.10

Data Pemerintah Kalurahan Baturetno

No	Nama	Jabatan
1	Sarjaka	Lurah Baturetno
2	Muhammad Lu'ai Arminanto, S.T.	Carik Baturetno
3	Budiono, S.I.P.	Tata Laksana
4	Sugiyanti	Danarta
5	Sumarmanta	Pangripta
6	Deni Dwi Kurniawan, S.Kom.	Kamituwa
7	Sopi Aribowo, A.Md.	Ulu-ulu
8	Supandi	Jagabaya
9	Suryani	Dukuh Mantup
10	Abdul Haris	Dukuh Wiyoro
11	Fahrudin Rijazul Khoir	Dukuh Kalangan
12	Triatmoko	Dukuh Plakaran
13	Sugito	Dukuh Gilang
14	Suprihatian	Dukuh Manggisan
15	Asih Lestari	Dukuh Ngipik
16	Sri Mulatinah	Dukuh Pelem

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disampaikan analisis dan pembahasan tentang penelitian skripsi yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam Pengembangan Objek Wisata”

1. Kapasitas Regulasi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

Kapasitas regulasi mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan yang mendukung pengembangan sektor tertentu. Dalam konteks ini, hal tersebut berhubungan dengan upaya pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengembangan objek wisata tersebut. Hal ini pun disampaikan oleh kepala Kalurahan Baturetno, Bapak Sarjaka, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam Pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno kami belum memiliki Peraturan Kalurahan, Produk hukum kami baru hanya untuk menerbitkan surat Keputusan Lurah untuk membentuk pengelola Desa Wisata Baturetno yakni “Dewi Retno”, jadi hanya dalam tugas pokok dan fungsi kepengurusan itu saja regulasinya.” (Wawancara, 25 november 2024)

Dalam wawancara diatas beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan atau peraturan yang secara spesifik mengatur pengembangan objek wisata di wilayah kalurahan Baturetno. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Lu'ai Arminanto sebagai Carik

kalurahan Baturetno yang menyatakan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah Kalurahan Baturetno belum memiliki regulasi yang khusus untuk pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno, tetapi pemerintah Kalurahan Baturetno memiliki Keputusan Lurah untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata. Konsekuesinya dari penerbitan surat Keputusan tersebut kita memfasilitasi untuk kegiatan Dewi Retno dalam rapat-rapatnya dan menunjang *event-event* yang ada.” (Wawancara, 25 november 2024)

Dari hasil wawancara bersama kepala kalurahan Baturetno Bapak Sarjaka dan Carik kalurahan Baturetno Bapak Lu'ai Arminanto tentang kapasitas regulasi pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata, diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno belum memiliki Peraturan Kalurahan yang mengatur secara khusus tentang pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan Baturetno hanya menerbitkan Keputusan Lurah untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Dewi Retno) sebagai pengelola objek wisata Telaga Desa Baturetno.

2. Kapasitas Ekstraksi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

Kapasitas ekstraksi dalam konteks pengembangan objek wisata di Kalurahan mengacu pada kemampuan pemerintah Kalurahan untuk memobilisasi sumber daya, baik berupa dana, manusia, maupun teknologi, guna mendukung pengembangan objek wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas ekstraksi mencakup aspek pengelolaan keuangan yang efektif, mobilisasi sumber daya eksternal,

serta kerjasama yang dapat mempercepat pengembangan wisata dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Saat melakukan observasi di Telaga Desa Baturetno, penulis mendapati adanya pembangunan panggung joglo yang sedang berlangsung di area tersebut. Pembangunan ini dibiayai menggunakan dana desa, Penggunaan dana desa ini mencerminkan kapasitas ekstraksi Kalurahan Baturetno dalam memobilisasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas wisata, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan infrastruktur yang dapat menunjang keberlanjutan sektor pariwisata di Telaga Desa Baturetno. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarjaka selaku Kepala Kalurahan Baturetno dalam kutipan wawancara berikut:

“Pemerintah Kalurahan Baturetno mengalokasikan anggaran dari APBKal Baturetno untuk pembangunan sarana dan prasarana di Telaga Desa Baturetno sejak pertama kali didirikan hingga saat ini. Salah satu proyek yang sedang berlangsung saat ini adalah pembangunan panggung joglo yang terletak di bagian selatan telaga. Selain itu, pemerintah Kalurahan Baturetno juga mengalokasikan dana APBKal untuk mendukung operasional kegiatan Kelompok Sadar Wisata Dewi Retno, yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata di desa ini.” (Wawancara, 25 november 2024)

Di samping itu, Bapak Lu'ai Arminanto selaku Carik Kalurahan Baturetno menambahkan keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Baturetno, seperti kutipan wawancara berikut:

“Sejak awal pendirian Telaga Desa, kami telah melibatkan masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan untuk

berjualan di lapak-lapak yang tersedia. Selain itu, untuk setiap acara yang diadakan, kami berkoordinasi dengan pemuda setempat untuk menjaga area parkir, sementara tugas kebersihan juga kami percayakan kepada masyarakat sekitar. Keamanan pun kami libatkan dengan melibatkan warga lokal, dalam Pengembangan objek wisata ini kami memprioritaskan untuk melibatkan masyarakat.” (Wawancara, 25 november 2024)

Selanjutnya Bapak Sopi Aribowo selaku Ulu-Ulu Kalurahan Baturetno menyampaikan sejauh mana keterlibatan masyarakat. Hal ini seperti yang beliau sampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi saat pengembangan Telaga Desa, tetapi sudah dimulai sejak tahap pembangunan, Walaupun yang membangun Telaga tersebut adalah kontraktor tapi kita meminta pihak kontraktor untuk melibatkan Masyarakat sekitar yang untuk ikut membangun Telaga Desa, walaupun pihak kontraktor memiliki kualifikasi tenaga kerja tetapi ada beberapa Masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi untuk ikut berkerja membangun Telaga Desa Baturetno.” (Wawancara, 2 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dan observasi diatas, mengenai kapasitas ekstrasi pemerintah kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno mengalokasikan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana Telaga Desa Baturetno dengan dibuktikan adanya Pembangunan panggung joglo yang sedang berlangsung saat ini, serta masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam sejak pembangunan hingga pengembangan Telaga Desa Baturetno pada saat ini.



Gambar 3. 1 Pembangunan Panggung Joglo Telaga desa Baturetno

3. Kapasitas Distribusi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

Kapasitas distributif merujuk pada kemampuan pemerintah atau lembaga terkait dalam mendistribusikan sumber daya, informasi, kebijakan, dan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam konteks pengembangan objek wisata, kapasitas distributif mencakup kemampuan pemerintah untuk memastikan akses yang setara bagi masyarakat terhadap peluang, pelatihan, dan fasilitas yang mendukung pengembangan sektor wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pengembangan objek wisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarjaka selaku Kepala Kalurahan Baturetno dalam kutipan wawancara berikut:

“Sejak awal pendirian Telaga Desa, kami telah melibatkan masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan untuk berjualan di lapak-lapak yang tersedia. Selain itu, untuk setiap acara yang diadakan, kami berkoordinasi dengan pemuda setempat untuk menjaga area parkir, sementara tugas kebersihan juga kami percayakan kepada masyarakat sekitar. Keamanan pun kami libatkan dengan melibatkan warga lokal, dalam Pengembangan

objek wisata ini kami memprioritaskan untuk melibatkan masyarakat.” (Wawancara, 25 november 2024)

Selanjutnya Ibu Nining Susilowati selaku pedagang di Telaga Baturetno juga hal yang sama seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebelum awal pembukaan telaga desa Baturetno, pihak pemerintah Kalurahan mengajak para masyarakat untuk berjualan di area telaga desa Baturetno, termasuk saya sebagai salah satu pedagang yang berjualan di pojok kuliner Telaga desa Baturetno.” (Wawancara, 10 Desember 2024)



Gambar 3. 2 Warung Pojok Kuliner Telaga desa Baturetno

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang Kapasitas Distributif Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno dapat diketahui bahwa, dapat diketahui bahwa bahwa dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno, pemerintah Kalurahan sangat mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, seperti berjualan di area yang disediakan, menjaga keamanan, serta menjaga kebersihan di sekitar objek wisata. Para pedagang, termasuk Ibu Nining Susilowati, juga merasa dilibatkan sejak awal pendirian objek wisata, dengan diberi kesempatan untuk berjualan di lokasi yang telah disiapkan. Upaya ini mencerminkan

komitmen pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat setempat, sekaligus memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat langsung dari pengembangan objek wisata tersebut.

4. Kapasitas Responsif Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dan perencanaan pengembangan Telaga Desa Baturetno. Dalam kapasitas Responsif, Kalurahan Baturetno menerima dan merealisasikan aspirasi dan masukan masyarakat sekitar, seperti kutipan wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Lurah Baturetno sebagai berikut:

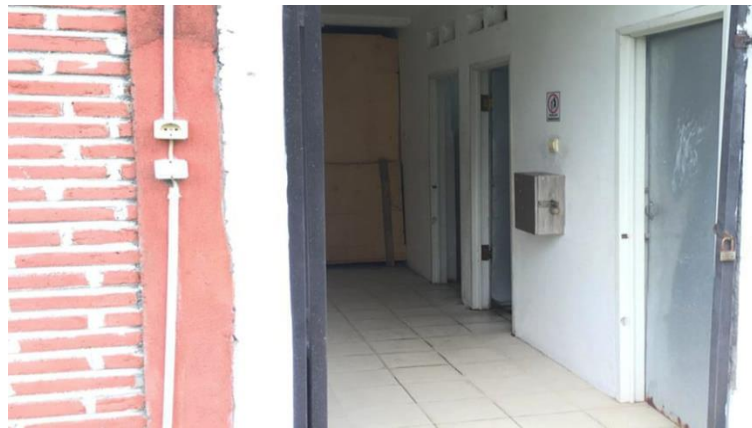
“Kita mengidentifikasi aspirasi atau kebutuhan masyarakat melalui musyawarah kalurahan. Dalam forum masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terkait pengembangan objek wisata, tak hanya dari situ saja kami juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti saat sedang kerja bakti dan ronda” (Wawancara, 25 november 2024)

Selanjutnya bapak Jumarudin selaku ketua Badan Musyawarah Kalurahan Baturetno menyampaikan bagaimana pihak Kalurahan menanggapi aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait Telaga Desa Baturetno:

“Jika ada aspirasi dan Masukan dari masyarakat Pemerintah Kalurahan Baturetno menerimanya dan dikonsultasikan dengan ahli tata ruang kalurahan, kalo memang sekiranya bagus tata ruangnya juga menyetujui maka tidak masalah direalisasikan, kemudian kalo ada tambah-tambahan dari masyarakat contohnya dulu usulan yang pertama adalah tentang fasilitas MCK yang belum ada sehingga masyarakat yang berkunjung ke Telaga Baturetno jadi kesusahan untuk mencari kamar mandi, akhirnya

pihak Kalurahan Baturetno merealisasikan aspirasi dan masukan dari masyarakat” (Wawancara, 5 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang Kapasitas Responsif Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno dapat diketahui bahwa, pemerintah Kalurahan merespon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan objek wisata, khususnya Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan Baturetno aktif mengidentifikasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan. Tidak hanya itu, pihak kalurahan juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat kerja bakti dan ronda, yang menunjukkan keterbukaan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di luar forum formal.



Gambar 3. 3 Fasilitas MCK

5. Kapasitas Jaringan Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata.

Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah Kalurahan mengembangkan jaringan Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan obek

wisata Telaga Desa Baturetno. Jaringan yang perlu dibangun dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno berupa jaringan dengan pihak lain seperti koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau provinsi dan universitas-universitas. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Sarjaka selaku Lurah Baturetno sebagai berikut:

“Selama ini kalurahan Baturetno menjalin kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi, pihak Kementrian dan Perguruan tinggi untuk mengikutkan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata untuk mengikuti pelatihan tersebut, pelatihan yang diadakan tersebut beragam dari pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan kependidikan, pelatihan pengelolaan sampah dan pengelolaan *homestay*.” (Wawancara, 8 Desember 2024)

Hal ini sama seperti kutipan wawancara dengan Carik Baturetno Bapak Lu'ai Arminanto sebagai berikut:

“Dalam upaya meningkatkan daya kreatif masyarakat kami mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam pelatihan yang diadakan dari pihak luar seperti pihak pemerintah Kabupaten ataupun Universitas-Universitas, pelatihan yang diadakan ada berbagai macam seperti, pelatihan pembuatan *souvenir* berbasis alam, pemberdayaan UMKM dan penyuluhan tentang pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.” (Wawancara, 25 november 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kapasitas jaringan dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan perguruan tinggi, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola objek wisata. Kerja sama ini mencakup berbagai pelatihan yang beragam,

seperti pelatihan pengelolaan desa wisata, kepeemanduan, pengelolaan sampah, homestay, pembuatan souvenir berbasis alam, pemberdayaan UMKM, serta penyuluhan tentang pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, mendorong kreativitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan objek wisata yang lebih baik dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kapasitas Regulasi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno belum memiliki Peraturan Kalurahan yang mengatur secara khusus tentang pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan Baturetno hanya menerbitkan Keputusan Lurah untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Dewi Retno) sebagai pengelola objek wisata Telaga Desa Baturetno.
2. Kapasitas Ekstrasi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Baturetno mengalokasikan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana Telaga Desa Baturetno dengan dibuktikan adanya Pembangunan panggung joglo yang sedang berlangsung saat ini, serta masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam sejak pembangunan hingga pengembangan Telaga Desa Baturetno pada saat ini.
3. Kapasitas Distribusi Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno dapat diketahui bahwa bahwa dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno, pemerintah Kalurahan sangat mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Pemerintah memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, seperti berjualan di area yang disediakan, menjaga keamanan, serta menjaga kebersihan di sekitar objek wisata. Para pedagang, termasuk Ibu Nining Susilowati, juga merasa dilibatkan sejak awal pendirian objek wisata, dengan diberi kesempatan untuk berjualan di lokasi yang telah disiapkan. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat setempat, sekaligus memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat langsung dari pengembangan objek wisata tersebut.

4. Kapasitas Responsif Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno diketahui bahwa pemerintah Kalurahan memiliki respons yang baik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan objek wisata, khususnya Telaga Desa Baturetno. Pemerintah Kalurahan Baturetno aktif mengidentifikasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan. Tidak hanya itu, pihak kalurahan juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat kerja bakti dan ronda, yang menunjukkan keterbukaan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di luar forum formal.
5. Kapasitas Jaringan Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan perguruan tinggi, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

mengelola objek wisata. Kerja sama ini mencakup berbagai pelatihan yang beragam, seperti pelatihan pengelolaan desa wisata, kependudukan, pengelolaan sampah, homestay, pembuatan souvenir berbasis alam, pemberdayaan UMKM, serta penyuluhan tentang pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, mendorong kreativitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan objek wisata yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Kalurahan Baturetno diharapkan Menyusun Regulasi yang khusus mengatur pengelolaan dan pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno, Peraturan ini akan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan wisata, baik dari segi pengaturan sarana dan prasarana, perlindungan lingkungan dan memastikan pengembangan objek wisata Telaga Desa Baturetno berjalan dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widjaja. A.W 2003, Otonomi Desa. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Eko, Sutoro. 2014. Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Husain. M. 2009. Manajemen Strategi. Kudus: DIPA STAIN.
- Marpaung. 2000. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Prawitno, Alam. 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Sri Larasati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Taylor dan Bogdan. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya

Jurnal

- Agustina Setiawan, Widuri Wulandari dan Siti Munawaroh. 2024. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja* 7(1):15-27
- Ari Kusumah Wardani dan Slamet Riyadi. 2020. Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat* 6(4):792-799
- Amri Khairul, Wahidar Ismi Tutut, Fuadi Ahmad, Habibie Kusuma Dedi dan Meiwanda Geovani. 2022. Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara* 15(2):379-387
- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(2):219-234
- Eriyadi Kerisman, Firmando Boni Harisan, Nadeak J R Tio, Simbolon T Elvri dan Lase Sudirman. 2023. Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Wisata Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 1(4):104-118

- Erni Irawati. 2021. Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(2):635-641
- Fahira, N.S, Umar Rusdianto dan Habibi M.M.2022.Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.*Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2(3):291-303
- Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti. 2016. Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota* 4(1): 76–86
- Iriawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2(2):635-642
- Iswanti, Susi dan Zulkarnaini (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.*Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9(1):92-103
- Khotimah, Jasilatul. Dan Pawestri, Aprilina (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai.*Jurnal Pamator* 15(2):45-59
- Masrudi. Chotimah, Nur dan Rahman N.H.A.2021.Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Koja Doi.*Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3(3):35-46
- Nugraha, Y.E, dan Enga, E.R.L.2021.Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam.*Jurnal Media Wisata* 19(1):68-72
- Neri Fajarwati. 2019. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja* 22(2): 219-234
- Putri Aulia Anggita dan Sukmana Hendra. 2022. Analisis Program Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Indonesian of Public Policy Review* 18:1-6
- Prihastha, A.K dan Suswanta (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan.*Jurnal Master Pariwisata* 7(1):221-240
- Prafitri, G.A. Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1):76-86

- Setiawan, A. Wulandari, W. Munawaroh, S. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja*, 7(1):15-27
- Siswoyo, Mukarto. Komara, Acep. Siddiq, D.M. Putra, Y.P. dan Lestari, Indah. 2022. *Social Learning Theory* dalam Pemodelan Pengembangan Wisata Embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 6(2):189-202
- Soeraya St, Barisan dan Jabbar Abdul. 2020. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Desa Wisata Alam Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidereng Rappang. *Jurnal Wedana* 6(2):1-13
- Turambi, J.Y, Lengkong F.D.J dan Plangiten N.N.2023.Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bagi Masyarakat Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat. *Jurnal Administrasi Publik* 9(4):580-587
- Wardani, A.K. Riyadi, S. (2020). Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 6(4):792-799
- Wardana Data, Zainal dan Ginting Harimas Arwanto. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 10(1):211-219

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan.

PEDOMAN WAWANCARA

Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno Dalam Pengembangan Objek Wisata

*(Studi Kasus di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

I. Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Objek wisata

a. Kapasitas Regulasi

2. Bagaimana peran pemerintah kalurahan dalam menyusun aturan atau kebijakan untuk mengembangkan objek wisata di wilayah ini?

3. Regulasi apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah kalurahan untuk mendukung pengembangan objek wisata?

b. Kapasitas Ekstrasi

1. Langkah apa saja yang telah diambil pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan aset desa untuk tujuan pariwisata?

2. Se jauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengembangan objek wisata? Apakah ada program atau inisiatif khusus untuk memberdayakan mereka?
3. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengarahkan warga masyarakat dalam pengembangan objek wisata?

c. Kapasitas Distribusi

1. Apa upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek ekonomi yang dihasilkan oleh objek wisata, seperti dalam hal penyediaan produk atau jasa?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata di telaga desa baturetno?

d. Kapasitas Responsif

1. Bagaimana pemerintah kalurahan mengidentifikasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan objek wisata?
2. Bagaimana pemerintah kalurahan menanggapi umpan balik dari masyarakat terkait pengembangan objek wisata? Apakah ada perubahan yang dilakukan berdasarkan masukan tersebut?

e. Kapasitas Jaringan

1. Apakah pemerintah kalurahan memiliki hubungan dengan organisasi masyarakat atau komunitas lokal yang berperan dalam pengembangan wisata? Bagaimana kerjasama tersebut berlangsung?

2. Bagaimana pemerintah kalurahan membangun jaringan atau kemitraan dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, atau LSM, dalam rangka pengembangan objek wisata?

LAMPIRAN – LAMPIRAN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 096/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Chresno Adhi Wijoyo
No. Mahasiswa	: 20520111
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 18 Oktober 2023
Judul Proposal	: Governing Pemerintah Desa dalam Memperkuat Modal Sosial dan Modal Ekonomi Masyarakat dengan Pengelolaan Wisata di Kalurahan Baturetno

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Dr. Rijel Samaloisa



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI ILAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI ILAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI ILAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI ILAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 426/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Chresno Adhi Wijoyo
Nomor Mahasiswa : 20520111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan,,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Sasaran : Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam
Pengembangan Objek Wisata untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 November 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI FI MBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 869/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Chresno Adhi Wijoyo
No Mhs : 20520111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Kalurahan Baturetno dalam Pengembangan Objek Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tempat : Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan,, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 6 November 2024

Ketua

Din Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama bapak Sarjaka selaku Kepala Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Lu'ai Arminanto, S.T selaku Carik Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama bapak Sopi Aribowo, A.Md. selaku Ulu-ulu Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama bapak Dr. Jumarudin, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Bamuskal Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama saudara Asfriadhi Rizky selaku Masyarakat Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama saudara Rafli Ramadhani selaku Masyarakat Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama bapak Sopi Aribowo, A.Md.selaku Wakil Ketua Pokdarwis Kalurahan Baturetno



Wawancara Bersama ibu Nining Susilowati, S.E selaku pedagang di area Telaga Desa Baturetno